
LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA

PT.BPR. HARTHA MURIATAMA

PERIODE JANUARI - DESEMBER 2020



BAB I

PENDAHULUAN

Sesuai amanat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang PENERAPAN TATA KELOLA BAGI BANK PERKREDITAN RAKYAT dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 5/SE OJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang PENERAPAN TATA KELOLA BAGI BANK PERKREDITAN RAKYAT, setiap BPR wajib menerapkan Tata Kelola yang Baik, yaitu dari Level Organisasi dengan menyusun Struktur Organisasi dan Staff, lalu Level Penyusunan Aturan dan Kebijakan, serta Level Pelaksanaan dan Proses untuk mendapatkan hasil yang diharapkan.

Terkait Implementasi hal tersebut maka kami laporkan Implementasi PENERAPAN TATA KELOLA BAGI BANK PERKREDITAN RAKYAT untuk periode Januari sampai dengan Desember 2020 di BPR.Hartha Muriatama (BPR.HMT) dengan mengacu pada prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggung jawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*), yaitu :

- a. Keterbukaan (*transparency*) yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.
- b. Akuntabilitas (*accountability*) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ BPR sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.
- c. Pertanggungjawaban (*responsibility*) yaitu kesesuaian pengelolaan BPR dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip pengelolaan BPR yang sehat.
- d. Independensi (*independency*) yaitu pengelolaan BPR secara profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun.
- e. Kewajaran (*fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

BAB II

POKOK ISI LAPORAN

Pokok isi Laporan Tata Kelola ini, mengacu pada Psl 75 POJK No.4/2015) dan SE OJK No. 5/2015 tentang Penerapan Tata Kelola, sebagai berikut:

II.1. Ruang lingkup Tata Kelola

adalah penilaian faktor-faktor yang meliputi :

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
3. Pelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi komite;
4. Penanganan benturan kepentingan;
5. Penerapan fungsi kepatuhan, audit intern, dan audit ekstern;
6. Penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern;
7. Patas maksimum pemberian kredit;
8. Rencana bisnis BPR;
9. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.

II.2 Self Assesment

yaitu hasil penilaian sendiri (self assesment) atas penerapan Tata Kelola BPR yang akan disajikan dalam Kertas Kerja tersendiri dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam Laporan ini.

1. Kepemilikan saham anggota Direksi serta hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham BPR
2. Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris serta hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan/atau pemegang saham BPR.
3. Paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan
4. Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah;
5. Frekuensi rapat Dewan Komisaris.
6. Jumlah penyimpangan intern yang terjadi dan upaya penyelesaian oleh BPR;
7. Jumlah permasalahan hukum dan upaya penyelesaian oleh BPR;
8. Transaksi yang mengandung benturan kepentingan; dan
9. Pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik, baik nominal maupun penerima dana.

BAB III URAIAN POKOK-POKOK LAPORAN

III.1 Ruang lingkup Tata Kelola

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi :

a. Jumlah dan komposisi anggota Direksi per 31 Desember 2020 :

Pada akhir 2020, formasi Direksi di BPR HMT dalam kondisi lengkap, Sehingga Formasi Direksi BPR HMT per 31 Desember 2020 adalah :

- **Direktur Utama** : Felix Suswanto, S.Sos (untuk masa jabatan 26-8-2017 s.d 26-8-2022, berdasarkan risalah RUPS yang dinyatakan dalam Akta Notaris Lilis Gunawan, SH, No.22 tgl 24-8-2017)
- **Direktur & YMK** : Sindang Iwari : (untuk masa jabatan 19-03-2019 s/d 19-03-2024 berdasarkan risalah RUPS yang dinyatakan dalam Akta Notaris Lilis Gunawan, SH, No.21 tgl 28 Maret 2019)

b. Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris;

Dalam memastikan dipenuhinya seluruh ketentuan OJK dan Otoritas lainnya, serta memastikan dalam implementasinya tidak bertentangan dengan seluruh ketentuan yang berlaku, Dewan Komisaris melakukan pengawasan secara rutin dan kontinyu, baik dengan melakukan kunjungan langsung, pemantauan laporan keuangan serta berkomunikasi langsung dengan staff. Berdasarkan aktifitas tersebut, Dewan Komisaris memberikan masukan dan arahan langsung (yang umumnya berlangsung spontan dan informal) dan telah ditindak lanjuti oleh Direktur & YMK, untuk penyusunan atau perbaikan atas arahan dan masukan tersebut, baik berupa SE/SK atau perubahan cara kerja, komunikasi, dll

Untuk temuan OJK semaksimal mungkin ditindak lanjuti Direktur & YMK berkoordinasi dengan seluruh unit terkait, sesuai dengan komitmen yang disampaikan kepada OJK.

Sebagai response atas belum tercapainya kinerja yang diharapkan dan juga terkait dengan pemenuhan ketentuan pada tahun 2019, baik berupa SK, SOP atau hal lainnya. Maka pada tahun 2020, telah disusun, sosialisasi beberapa SK, SOP dan hal lainnya, sebagai berikut :

1. SOP STIMULUS COVID-19 No. 02/DIR/BPR-HMT/SOP-STIMULUS/III/2020
2. SOP Pelaksanaan Fungsi Audit Intern No. 03/DIR/BPR-HMT/SOP-AI/VIII/2020
3. Opini Kredit No. 02/DIR/BPR-HMT/O-K/IX/2020
4. SOP Perlindungan Konsumen No. 08/DIR/BPR-HMT/SOP-PK/IX/2020
5. SOP Ruang Khasanah No. 09/DIR/BPR-HMT/SOP-RK/IX/2020
6. Promo Deposito Umum No. 01/DIR/BPR-HMT/DEP-U/X/2020
7. Promo Tabungan Umum No. 02/DIR/BPR-HMT/P-TU/X/2020
8. Format Analisa Kredit & Analisa Jaminan No.04/DIR/BPR-HMT/F-AKAJ/X/20

Dan juga kerjasama dengan pihak ketiga yaitu :

1. PKS dengan Notaris/PPAT Rusdiyono,SH,MKn dengan No. 03/DIR/BPR/HMT/III/2020 untuk pengikatan jaminan kredit
2. PKS dengan Notaris/PPAT MeutiaAulia Devi,SH,Mkn dengan no. 02/NOT/XI/2020 untuk pengikatan jaminan kredit

Dalam penambahan Modal disetor masih dalam proses di OJK, seluruh dokumen dan persyaratan telah dikirimkan ke OJK pada akhir 2020, dan hingga akhir tahun 2020, masih dalam proses persetujuan. Untuk Setoran Tambahan

Modal sebesar Rp.2.107.000.000,- (dua milyar seratus tujuh juta rupiah) telah ditempatkan di Escrow Account di Bank BTN – Kantor Cabang Kudus, dalam 2 Bilyet deposito dan Deposito di BPR Hartha Muriatama yaitu :

1. Bilyet No SERI A 2015021 sbsr Rp. 407.000.000,00 a/n DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN QQ : PT BPR HARTHA MURIATAMA
2. Bilyet No SERI A 2015023 sbsr Rp. 300.000.000,00 a/n DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN QQ : PT BPR HARTHA MURIATAMA
3. Bilyet No SERI 0002007 sbsr Rp. 1.400.000.000,00 a/n DEWAN KOMISIONER OJK QQ ALFI HIDAYAT

c. Pelaksanaan Operasional

Pada tahun 2020 Direksi telah berusaha maksimal untuk merealisasikan rencana kerja. Dengan segala usaha dan kendala yang ada, hasil pada 2020 adalah,

Progress dan Realisasi Kinerja Keuangan Tahun Buku 2020

(dalam ribuan rupiah)

Perkembangan Target Vs Realisasi Keuangan

No	Pos	Target	Realisasi	Deviasi	
				Nominal	%
1	Total Asset	27.234.605	25.487.816	(1.746.789)	-6,41%
2	OSC Kredit	19.170.409	18.025.195	(1.145.214)	-5,97%
3	Tabungan	5.949.156	3.260.704	(2.688.452)	-45,19%
4	Deposito	10.278.428	10.135.100	(143.328)	-1,39%
5	Equitas	6.164.753	4.275.672	(1.888.081)	-30,63%
8	Laba sebelum Pajak	633.765	63.007	(570.758)	-90,06%

BPR. Hartha Muriatama melakukan seluruh transaksi berdasarkan SAK-ETAP dan telah diaudit oleh KAP Ganung AB (Ganung Agung Budiarto,SE, AK, CA, CPA NIAP : AP.1370) serta telah dilaporkan ke OJK pada tanggal 1 Desember 2020 dengan nomor surat 95/OJK/DIR/BPR-HMT/KAP/XII/2020. RUPS Pertanggung jawaban Direksi untuk tahun buku 2020 yang direncanakan pada minggu pertama Bulan Mei 2021.

d. BMPK

Tidak terjadi pelanggaran BMPK. Untuk mencegah terjadinya pelanggaran BMPK, adalah dengan selalu membandingkan Realisasi Kredit dan Penempatan Dana dengan Modal Inti.

e. Tata Kelola, Fungsi Kepatuhan dan Manajemen Resiko

Dalam menjalankan fungsi Kepatuhan dan Manajemen Resiko, BPR HMT secara formal telah menyusun Struktur Organisasi sesuai dengan ketentuan, dan menetapkan Direksi dan Pejabat yang menjalankan Fungsi Kepatuhan dan Manajemen Resiko, yaitu Sdr. Sri Winarni dengan SK Penunjukkan sbg PE Kepatuhan No 27/DIR/BPR/HMT/III/2017 tgl 31 Maret 2017 dan SK Penunjukan sebagai PE ManRisk No.13/DIR/BPR/HMTV-2018 tgl.18 Mei 2018 dan untuk formasi Direktur & YMKF telah diisi berdasarkan RUPS tanggal 19 Maret 2019 seperti yang disampaikan pada Akta Notaris Lilis Gunawan, SH. No 21 Tanggal 28 Maret 2019.

Banyak hal harus terus dilakukan dan dipenuhi agar Unit Kepatuhan dan Manajemen Resiko dapat dilakukan sepenuhnya, mulai dari Struktur Organisasi, Aturan dan Kebijakan dan juga personil yang memiliki pengetahuan, pemahaman dan orientasi yang memadai mengenai Kepatuhan dan Manajemen Resiko.

Hasil penilaian self assessment dengan nilai dan peringkat komposit 1,85.

- f. **Transparansi Kondisi keuangan dan Non Keuangan**
Laporan Keuangan Perusahaan telah di Audit oleh KAP yang terdaftar di OJK yaitu KAP Ganung AB (Ganung Agung Budiarto,SE, AK, CA, CPA NIAP : AP.1370) BPR tidak melakukan intervensi apapun terhadap KAP.

Laporan Audit KAP tahun buku 2020 dikirimkan ke OJK, berdasarkan surat No.26/DIR/OJK/BPR/HMT/IV/2021 tgl 16 April 2021 dan juga dikirimkan langsung oleh KAP ke OJK. Dan Laporan Publikasi Triwulan I tahun buku 2020 tgl 13 April 2020, Triwulan II tgl 10 Juli 2020, Triwulan III tgl 14 Oktober 2020, Triwulan IV tgl 13 Januari 2021 dan Tahunan tgl 31 Maret 2021 di koran Joglo Jateng.

2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris :

a. Jumlah dan komposisi anggota Dewan Komisaris :

- Komisaris Utama : Ratna Sari S.E (untuk masa jabatan 29-11-2020 s.d 29-11-2025 berdasarkan risalah RUPS yang dinyatakan dalam Akta Notaris Lilis Gunawan,SH No.5 tgl 5-4-2015)
- Komisaris : H. Asnan Saleh (untuk masa jabatan 18-01-2019 s.d 18-01-2024 berdasarkan risalah RUPS yang dinyatakan dalam Akta Notaris Lilis Gunawan,SH No.8 tgl 17-01-2019)

b. Tindak lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris Kepada Direksi

Rekomendasi Dewan Komisaris disampaikan kepada Direksi dan telah menindaklanjuti rekomendasi Dewan Komisaris tersebut. Akan tetapi belum terdokumentasi dengan lengkap dan rapi.

c. Fungsi Pengawasan Dewan Komisaris

Dewan Komisaris menjalankan fungsi pengawasan dengan kegiatan :

1. Komisaris utama hadir di kantor BPR minimal 4 kali sebulan untuk melakukan evaluasi terhadap Bisnis Plan dan pembahasan issue strategis lainnya.
Sedangkan Komisaris hadir di kantor 1 kali dalam seminggu untuk efektifitas monitoring dan memberi masukan terkait pencapaian target.
Akan tetapi tidak terdokumentasi dengan lengkap dan rapi.
2. Menyelenggarakan rapat minimal 4 kali dalam 1 tahun. Pada tahun 2020 dilakukan rapat akan tetapi tidak terdokumentasi dengan lengkap dan rapi.
3. Mengawasi dan memberikan saran-saran kepada Direksi, dengan pengawasan langsung (OTS) dan tidak langsung (memeriksa berkas-berkas) dan Laporan Keuangan.
4. Mengetahui pembuatan pedoman-pedoman SK/SE sebagai pedoman kerja sebagai berikut :

No.	No. SK	Perihal	Tanggal
	TAHUN 2020		
1	01/DIR/BPR/HMT/SK- PK/I/2020	INSENTIF PELUNASAN KREDIT BAGI KARYAWAN	02/01/2020
2	02/DIR/BPR/HMT/SK- IAK/I/2020	INSENTIF ANALIS KREDIT	02/01/2020
3	03/DIR/BPR/HMT/SK-K-A- T/I/2020	PROMO AKHIR TAHUN	02/01/2020
4	01/DIR/BPR/HMT/SK- DJ/II/2020	MUTASI JABATAN P. ANDHY	01/02/2020
5	04/DIR/BPR/HMT/P-B- H/II/2020	PENYIMPANAN HARDISK EKTERNAL & BACKUP DATA COREBANKING	14/02/2020
6	01/DIR/BPR/HMT/SOP-APU- PPT/III/2020	SOP APU PPT BERBASIS RISIKO PEDOMAN APU/PPT	13/03/2020
7	02/DIR/BPR/HMT/SOP- STIMULUS-C/III/2020	SOP STIMULUS COVID-19	26/03/2020
8	03/DIR/BPR/HMT/MOU- N/III/2020	PERJANJIAN KERJASAMA PT BPR HARTHA MURIATAMA DENGAN NOTARIS/PPAT	27/03/2020
9	01/DIR/BPR/HMT/R- J/IV/2020	ROLLING JABATAN	01/04/2020
10	02/DIR/BPR/HMT/R- J/IV/2020	ROLLING JABATAN	01/04/2020
11	03/DIR/BPR/HMT/P- BPN/VI/2020	PETUGAS PELAKSANA BPN ONLINE	03/06/2020
12	04/DIR/BPR/HMT/S- BPN/VI/2020	SUPERVISOR BPN ONLINE	03/06/2020
13	05/DIR/BPR/HMT/PIC- D/VI/2020	PIC DUKCAPIL	22/06/2020
14	1/DIR/BPR/HMT/R-J/VII/2020	PENEMPATAN JABATAN	01/07/2020
15	01/DIR/BPR/HMT/R- PD/VII/2020	REVISI PERJALANAN DINAS (01/DIR/BPR/HMT/P-D/XI/2019)	06/07/2020
16	02/DIR/BPR/HMT/KK- PK/VII/2020	KETENTUAN KREDIT PENGURUS & KARYAWAN	09/07/2020
17	03/DIR/BPR/HMT/PIC- SB/VII/2020	PIC SUBSIDI BUNGA COVID - 19	27/07/2020
18	1/DIR/BPR/HMT/K- PK/VIII/2020	KETENTUAN PRODUK KREDIT	22/08/2020

19	01/DIR/BPR/HMT/PE-AI/VIII/2020	PEJABAT EKSEKUTIF AUDIT INTERNAL	29/08/2020
20	02/DIR/BPR/HMT/P-KT/VIII/2020	PENGANGKATAN KARYAWAN TETAP	29/08/2020
21	03/DIR/BPR/HMT/SOP-AI/VIII/2020	SOP AUDIT INTERNAL	29/08/2020
22	01/DIR/BPR/HMT/PK-LB/IX/2020	PELAKSANA KUASA LIMIT BACKOFFICE	01/09/2020
23	02/DIR/BPR/HMT/SK-OK/IX/2020	SK OPINI KREDIT	11/09/2020
24	03/DIR/BPR/HMT/PE-PK/IX/2020	PE PERLINDUNGAN KONSUMEN	30/09/2020
25	04/DIR/BPR/HMT/KABAG-OP/IX/2020	KEPALA BAGIAN OPERASIONAL	30/09/2020
26	05/DIR/BPR/HMT/KABAG-B/IX/2020	KEPALA BAGIAN BISNIS	30/09/2020
27	06/DIR/BPR/HMT/PE-APU-PPT/IX/2020	PEJABAT EKSEKUTIF APU PPT	30/09/2020
28	07/DIR/BPR/HMT/S-O/IX/2020	STRUKTUR ORGANISASI	30/09/2020
29	08/DIR/BPR/HMT/SOP-PK/IX/2020	SOP PERLINDUNGAN KONSUMEN	30/09/2020
30	09/DIR/BPR/HMT/SOP-RK/IX/2020	SOP RUANG KHASANAH	30/09/2020
31	01/DIR/BPR/HMT/P-DU/X/2020	PROMO DEPOSITO UMUM	01/10/2020
32	02/DIR/BPR/HMT/P-TU/X/2020	PROMO TABUNGAN UMUM	01/10/2020
33	03/DIR/BPR/HMT/SB-DU/X/2020	SUKU BUNGA DEPOSITO UMUM	01/10/2020
34	04/DIR/BPR/HMT/F-AK-AJ/X/2020	FORMAT ANALISA KREDIT DAN ANALISA JAMINAN	01/10/2020
35	05/DIR/BPR/HMT/T-S/X/2020	TABUNGAN SIMPEL	02/10/2020
36	06/DIR/BPR/HMT/R-J/X/2020	ROLLING JABATAN	19/10/2020
37	07/DIR/BPR/HMT/R-J/X/2020	PENEMPATAN JABATAN	19/10/2020
38	08/DIR/BPR/HMT/SB-T/X/2020	SUKU BUNGA TABUNGAN	19/10/2020
39	01/DIR/BPR/HMT/S-G-K/XI/2020	STRUKTUR GAJI KARYAWAN	02/11/2020

40	02/DIR/BPR/HMT/I-T-K/XI/2020	INSENTIF TARGET KREDIT	06/11/2020
41	03/DIR/BPR/HMT/P-P/XI/2020	PERATURAN PERUSAHAAN	16/11/2020
42	04/DIR/BPR/HMT/S-S-U/XI/2020	STRUKTUR DAN SKALA UPAH	16/11/2020
43	05/DIR/BPR/HMT/C-B/XI/2020	CUTI BESAR	16/11/2020
44	06/DIR/BPR/HMT/W-K/XI/2020	PERUBAHAN WAKTU KERJA	17/11/2020
45	07/DIR/BPR/HMT/B-DU/XI/2020	SUKU BUNGA DEPOSITO UMUM	25/11/2020
46	08/DIR/BPR/HMT/S-B/XI/2020	SUBSIDI BUNGA	30/11/2020
47	01/DIR/BPR/HMT/P-KT/XII/2020	PENGANGKATAN KARYAWAN TETAP	11/12/2020
48	02/DIR/BPR/HMT/SOP-AKUNT/XII/2020	SOP AKUNTANSI	29/12/2020
No.	No. SE	Perihal	Tanggal
1	2/DIR/BPR-HMT/P-KC/II/2020	PEMBAGIAN KERJA COLLECTOR	11/02/2020
2	1/DIR/BPR-HMT/P-PJK/III/2020	PENGUMUMAN PENYESUAIAN JAM KERJA	18/03/2020
3	1A/DIR/BPR-HMT/P-PJK/III/2020	SOP STIMULUS COVID 19	26/03/2020
4	2/DIR/BPR-HMT/P-PJK/III/2020	PENGUMUMAN PERPANJANGAN PENYESUAIAN JAM KERJA	27/03/2020
5	1/DIR/BPR-HMT/P-PJA/IV/2020	PEMBAGIAN KERJA ANALIS KREDIT	01/04/2020
6	2/DIR/BPR-HMT/A-K/IV/2020	ASURANSI PENJAMINAN KREDIT	01/04/2020
7	3/DIR/BPR-HMT/P-W-MK/IV/2020	PEMBAGIAN WILAYAH MARKETING KREDIT	01/04/2020
8	1/DIR/BPR-HMT/P-K/VI/2020	PELEMPARAN KREDIT MASA COVID	10/06/2020
9	1/DIR/BPR-HMT/P-P-S/X/2020	PROMO PEMBERIAN SOUVENIR BAGI DEBITUR KREDIT	01/10/2020
10	1/DIR/BPR-HMT/P-HK-JK/XI/2020	PERUBAHAN HARI KERJA DAN JAM KERJA	23/11/2020

III.2 Susunan Pengurus dan Pemegang Saham

- a. Susunan pengurus yang tercatat dalam administrasi Bank pada 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

PENGURUS

JABATAN	NAMA
Komisaris Utama	Ratna Sari S.E
Komisaris	H. Asnan Saleh
Direktur Utama	Felix Suswanto, S.Sos
Direktur & YMFK	Ir. Sindang Iwari

PEMEGANG SAHAM

PEMEGANG SAHAM	KEPEMILIKAN SAHAM	
	Nominal	%
AJI PRAYITNO	1.494.000.000	36,44
H. ASNAN SALEH	850.000.000	20,73
SUSILO WINARKO	600.000.000	14,63
CH SURYATI	310.000.000	7,56
GREGORIUS N.M	300.000.000	7,32
KAMSIRIN	270.000.000	6,59
RIEZKY A N	156.000.000	3,80
VU SUNARTI	120.000.000	2,93
TOTAL	4.100.000.000	100,00

- b. Daftar Kepemilikan Saham Direksi dan hubungan keluarga/keuangan di PT BPR. Hartha Muriatama

Direksi	Kepemilikan Saham (%)	Hubungan keluarga/keuangan
Direktur Utama : Felix Suswanto, S.Sos	NIHIL	--
Direktur & YMFK: Sindang Iwari	NIHIL	--

Daftar Kepemilikan Saham Direksi dan hubungan keluarga/keuangan di BPR lain

Direksi	Kepemilikan Saham	Hubungankeluarga/keuangan
Direktur Utama : Felix Suswanto, S.Sos	NIHIL	--
Direktur & YMFK: Sindang Iwari	NIHIL	--

Daftar Kepemilikan Saham Direksi dan hubungan keluarga/keuangan di perusahaan lain

Direksi	Kepemilkansaham	Hubungankeluarga/keuangan
Direktur Utama : Felix Suswanto, S.Sos	NIHIL	--
Direktur & YMFK : Sindang Iwari	NIHIL	--

- c. Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris serta hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan/atau pemegang saham BPR.

Daftar Kepemilikan Saham Dewan Komisaris
Di PT BPR Hartha Muriatama

Komisaris	Kepemilikan Saham	Hubungan keuangan/keluarga
Komisaris Utama : Ratna Sari S.E Akt.	NIHIL	Anak kandung dari ibu CH Sunarti (PSP)
Komisaris : H. Asnan Saleh	20,73%	--

Daftar Kepemilikan Saham Dewan Komisaris
Di BPR lain

Komisaris	Kepemilikan Saham	Hubungan keuangan/keluarga
Komisaris Utama : Ratna Sari S.E Akt.	NIHIL	---
Komisaris : H. Asnan Saleh	7% di BPR Arta Mranggen Jaya	---

Daftar Kepemilikan Saham Dewan Komisaris
di perusahaan lain

Komisaris	Kepemilikan Saham	Hubungan keuangan/keluarga
Komisaris Utama : Ratna Sari S.E Akt.	NIHIL	---
Komisaris : H. Asnan Saleh	NIHIL	---

- d. Paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang ditetapkan berdasarkan RUPS.

Daftar paket/kebijakan remunerasi Pengurus

- a. Berupa uang, dalam 1 tahun
 - Direksi (2 orang) : Rp.375.600.000,-
 - Dewan Komisaris (2 orang) : Rp.225.420.000,-
- b. Berupa fasilitas lain/non uang
 - Asuransi Manulife untuk Direksi (1 orang), iuran 1 tahun Rp.26.415.000,-
- c. Rasio gaji tertinggi dan terendah, per 31 Des 2020, dalam skala perbandingan:
 - rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah : 5,3 % : 1,6 %
 - rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah ; 16 % : 13 %
 - rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah; 7,6 % : 6,5 %
 - rasio gaji Direksi tertinggi dan Komisaris tertinggi; 14 % : 7,6 %
 - rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi; 14 % : 5,3 %

III.3 Frekuensi rapat Dewan Komisaris.

- a. Jumlah rapat yang diselenggarakan dalam 1 (satu) tahun;
Rapat diselenggarakan sebanyak 4 kali dalam 1 tahun, membahas Kinerja Tahun BPR dan issue strategis lainnya, dan Rencana Bisnis BPR. Tetapi belum terdokumentasi dengan lengkap dan baik.
- b. Jumlah rapat yang dihadiri secara fisik dan/atau melalui teknologi telekonferensi;
Jumlah rapat yang dihadiri secara fisik sebanyak 4 kali, dan melalui teknologi telekonferensi tidak pernah, keduanya tidak terdokumentasi dengan lengkap dan rapi.
- c. Kehadiran masing-masing anggota di setiap rapat;
Rapat sebanyak 4 kali dalam 1 tahun selalu dihadiri oleh seluruh anggota Komisaris. Akan tetapi tidak terdokumentasi dengan lengkap dan rapi.
- d. Topik atau materi rapat;
 - Membahas kinerja BPR
 - Target penyelesaian debitur2 Macet dan WO
 - Issue strategis lainnya.

III.4 Jumlah penyimpangan intern yang terjadi dan upaya penyelesaian oleh BPR;

- a. Jumlah internal fraud yang telah diselesaikan;
Tidak terjadi kasus fraud atau penyalahgunaan uang yang dilakukan oleh staff.
- b. Jumlah internal fraud yang sedang dalam proses penyelesaian di internal BPR.
Tidak terjadi internal fraud.
- c. Jumlah internal fraud yang belum diupayakan penyelesaiannya;
Tidak terjadi internal fraud.
- d. Jumlah internal fraud yang telah ditindaklanjuti melalui proses hukum :
Tidak ada Internal Fraud yang diproses hingga ke Ranah Hukum.

III.5 Jumlah permasalahan hukum dan upaya penyelesaian oleh BPR;

Tidak ada permasalahan Hukum yang sedang dihadapi BPR.

III.6 Transaksi yang mengandung benturan kepentingan

No	Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Rp.000.000)	Keterangan *)
1	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
2	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
3	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
4	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

*) tidak sesuai sistem dan prosedur yang berlaku dan menjelaskan keterkaitan antara nama dan jabatan pihak yang memiliki benturan kepentingan dengan nama dan jabatan pengambil keputusan.

III.7 Pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik, baik nominal maupun penerima dana.

No	Kegiatan Sosial	Jumlah (Rp)
1	NIHIL	NIHIL
2	NIHIL	NIHIL

BAB IV PENUTUP

Laporan Penerapan Tata Kelola BPR yang mengacu pada prinsip "TARIF" pada dasarnya merupakan seluruh proses kerja (business process) PT BPR. Hartha Muriatama pada tahun 2020 melalui pendekatan pemberdayaan seluruh Sumber Daya yang ada di BPR.

Demikian Laporan ini kami sampaikan.

Atas perhatian dan bimbingan yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Kudus, 28 Mei 2021

Hormat kami,

PT BPR . Hartha Muriatama



[Handwritten signature of Felix Suswanto]

Felix Suswanto, S.Sos
Direktur Utama

Ratna Sari, SE
Komisaris Utama